



Bangunan di Atas Talut Code Langgar IMB

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah bangunan yang berdiri di atas talut sungai Code yang longsor ditengarai melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, perbaikan talut yang sudah mulai longsor sejak 2016 silam urung dilakukan karena terdapat bangunan yang melanggar garis sempadan sungai.

"Berdasarkan surat dari balai besar wilayah sungai serayu dan opak

(BBWSSO) tertanggal 24 November 2017 tidak direkomendasikan adanya perbaikan. Hal ini karena ada bangunan yang melanggar garis sempadan sungai," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya, Aki Lukman Nur Hakim, Rabu (3/8).

Sementara, terkait bangunan di atas talut, juga ditengarai ter-

jadi pelanggaran IMB. Hal itu diketahui setelah pihaknya menanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Aki menjelaskan, berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memang ada penambahan ruang di belakang bangunan yang tidak sesuai IMB yang diajukan di awal.

● ke halaman 14

Bangunan di Atas Talut Code Langgar

● Sambungan Hal 13

Mengungsi

Untuk sementara ini, terkait dengan penanganan longsor di Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, pihaknya baru bisa mengarahkan warga untuk mengungsi. Pihaknya pun masih menunggu koordinasi dengan BBWSSO yang akan dilakukan bersama dengan Komisi C setempat untuk pemberian material longsor. Koordinasi ini akan dilakukan Senin pekan depan.

"Kami tunggu koordinasi terlebih dahulu. Percuma kalau langsung dibersihkan namun tidak segera dibangun. Apalagi lokasi longsor juga curam," katanya.

Pihaknya pun sedang menyusun surat melalui Penjabat (PJ) Wali Kota Yogya yang akan dikirimkan ke Direktorat Jendral (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditembuskan ke BBWSSO. Surat tersebut bukan hanya untuk penanganan longsor di Terban tapi juga yang berada di Gondolayu.

Pihaknya pun membenarkan jika ada potensi longsor susulan. Pasalnya jika ada getaran sedikit saja seperti gempa, angin, pun batu di atas sewaktu-waktu bisa rubuh. Apalagi, kondisi cuaca ekstrim yang hingga kini masih terjadi. Penjabat (PJ) Wali Kota Yogya, Sulistyono menjelaskan, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan BBWSSO. Untuk penanganan longsor di sungai Code ini, Sulistyono juga meminta instansi terkait harus dilihat secara keseluruhan.

"Jangan sampai nanti dibangun longsor lagi. Tentu juga tidak asal perbaikan dan bangun. Apalagi yang membangun itu juga warga sendiri," katanya.

Konsep M3K

Disinggung terkait banyaknya bangunan yang melanggar sempadan sungai, Sulistyono juga meminta konsep mundur, munggah, madep kali (M3K) yang dikampanyekan

Pemprov DIY bisa diterapkan dalam perbaikan talut di Terban. Pihaknya pun akan menggagas penataan yang sesuai dengan aturan.

"Kalau bisa memang ada jalan yang bisa digunakan untuk aktivitas berolahraga misalnya, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu menjadi salah satu alternatif dalam hal ini," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sedikitnya sembilan Kepala Keluarga (KK) warga Kampung Terban, RT2 RW 1, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogya terpaksa harus mengungsi. Hal ini lantaran talut sepanjang 20 meter dan setinggi 30 meter di bantaran sungai Code, longsor Senin (8/3).

Dari jumlah tersebut terdapat empat KK yang rumahnya terancam longsor secara langsung, diantaranya adalah Riyadi (42), Jumadi Yanto (45), Wanto (53), Supriyadi (53), dan Suroto (50). Sementara, lima KK lainnya terdampak tak langsung longsor, diantaranya adalah Ribut, Farhan, Lia, dan Karyono.

Jumadi Yanto, salah satu warga terdampak menjelaskan, sejak tahun 2000 dia sudah menempati bangunan rumah yang berada di dekat sungai Code tersebut. Dia menceritakan, talut tersebut dibangun oleh program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Sementara, sisanya dibangun oleh perorangan.

"Talut ini dibangun oleh se-orang warga yang memiliki bangunan di atas. Kami kurang tahu apakah karena memang konstruksinya yang kurang kuat sehingga talut jebol. Atau memang karena kurangnya perawatan pada talut sehingga ambrol," kata Jumadi.

Dia menjelaskan, talut tersebut sebelumnya ditumbuhi beberapa pepohonan dan juga rumput liar. Sehingga, diperkirakan akar dari pepohonan liar itu menyebabkan konstruksi talut jebol dan terjadilah longsor.

Jumadi berharap pemerintah kota setempat dan pihak terkait segera melakukan perbaikan pada talut jebol ini. Perbaikan ini sangat mendesak dilakukan karena setiap

harinya warga khawatir untuk beraktivitas di kawasan dekat talut longsor ini. "Kami berharap segera diperbaiki agar kami merasa aman," unainya.

Dipertanyakan

Kalangan legislatif meminta izin bangunan di sempadan sungai Code, Terban, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman harus diperjelas. Pasalnya, jika status perizinan rumah toko (ruko) dan rumah yang berada di sempadan sungai tidak jelas maka akan menghambat proses perbaikan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Christiana Agustiani mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi talut longsor. Selasa (7/3) lalu. Dari pengamatannya pihaknya mempertanyakan proses perizinan pembangunan ruko dan rumah di sempadan sungai dan berdiri di atas talut.

"Dari informasi yang kami dapat BBWSSO juga tidak mau memperbetuli jika ada bangunan di sempadan sungai," jelas Christiana, Rabu (8/3).

Menurutnya, jika terdapat bangunan ilegal memang membuat BBWSSO urung melakukan perbaikan. Hal itu dibuktikan dengan masih belum diperbaiki talut sejak longsor November 2016 lalu. Adapun dia juga menyebut untuk perbaikan talut yang rusak di Terban, berdasarkan informasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya, membutuhkan anggaran Rp4 miliar.

"Namun, sebelum diperbaiki talutnya, harus diperjelas dulu status izin bangunannya. Hal ini agar jangan sampai timbul kesan perbaikan talut hanya untuk menyelamatkan bangunan di atasnya," tegasnya.

Pihaknya meminta warga yang tinggal di kawasan tersebut untuk selalu berhati-hati dan siap mengungsi jika terjadi longsor susulan. Hanya saja, kondisinya memang dilematis. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan tempat hidup. Namun, sesuai aturan mereka berada di lokasi yang salah. Hanya saja, pihaknya mengingatkan warga untuk selalu siap dan waspada bila ada longsor susulan. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005